

Ilmu Pemerintah dan Studi Kepemerintahan

Achmad Nurmandi*

1. Introduction

Studi pemerintahan (Study on government) di Amerika Serikat dan Eropa (known government departement) berakar dari ilmu politik seperti perbandingan politik, teori politik dan politik Amerika.¹² Di universitas Australia, department of government digabungkan dengan international relations studies.³In National University of Sigapore, tidak ada department of government, but department of political science. Di Malaysia, semua universitas publik menawarkan studi political science per se dan administrasi publik. Sementara di Indonesia, ada tiga departeme di universitas negeri yaitu ilmu pemerintahan, administrasi publik dan ilmu politik. Sampai saat ini terdapat accredited 99 department of governments (government science).⁴

Ilmu pemerintahan pada awalnya diinisiasi oleh colonial Dutch untuk recruitmen pegawai negeri dikenal *Bestuurschool* and *Bestuursacademie* (Suranto, 2016) dan sampai saat ini masih ada dalam bentuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). In the recent years, government studies in Indonesian universities offer governance studies in dealing with the growing role of non government organization in public sector (Suranto, 2016). However, all government department offer also political science subject in curriculum, such as ⁵⁶ *political theory, consitutionalism theory, political parteis and electoral studies*.

Setiap masyarakat membutuhkan pemerintah. Ketidakadaan atau ketidakberdayaan pemerintah menyebabkan menurunkan derajat kehidupan manusia.⁷ Bank Dunia menggunakan indikator *Voice and Accountability* *Political Stability and Absence of Violence* *Government Effectiveness* *Regulatory Quality* *Rule of Law* dan *Control of Corruption*. Masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang besar karena transformasi sosial masyarakat yang demikian cepat yang mengubah sikap dan perilaku, yang menyebabkan riset ilmu-ilmu sosial sering ketinggalan di belakang. Transformasi sosial

¹<http://www.lse.ac.uk/government/degreeProgrammes/programmes/phd/Programme-Structure.aspx>

²<https://government.georgetown.edu/research-topics>

³http://sydney.edu.au/arts/government_international_relations/research/index.shtml

⁴<http://www.ban-pt-universitas.co/2015/05/universitas-ptn-pts-jurusan-ilmu-pemerintahan-terbaik-di-indonesia.html>

⁵<http://ipem.fisip.unpad.ac.id/>

⁶<http://ip.umy.ac.id/akademik/kurikulum/>

⁷<http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#doc>

ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi yang cepat, kesenjangan sosial ekonomi, demokratisasi politik, munculnya lembaga-lembaga sosial keagamaan yang baru, dan lain sebagainya. Secara lebih rinci transformasi politik sejak tahun 1998 telah menimbulkan liberalisasi politik, penguatan aktor-aktor politik berbasis teknologi informasi seperti sosial media, dan menguatnya pertarungan kontestasi antar partai politik dengan aktor-aktor politik otonom, terutama dalam kasus pencalonan presiden dan kepala daerah. Transformasi sosial ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan keagamaan non mainstream, pertarungan antara nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai masyarakat Barat, dan peran lembaga-lembaga keluarga yang menurun.

Yang paling muktahir adalah bencana kebakaran hutan dan perubahan ekosistem di berbagai daerah. Perubahan iklim dan bencana lingkungan lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor kelembagaan sosial dan politik pemerintahan yang kurang efektif. Berbagai tantangan tersebut menuntut riset-riset ilmu sosial yang transdisipliner dan *novelty* untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi. Dunia sosial pada abad ke-21 ditandai dengan ketidakstabilan dunia sehingga memerlukan asumsi-asumsi epistemologis yang baru sebagai basis interaksi antara ilmu sosial dan ilmu eksakta (Lowea, et al, 2013) dan juga ilmu agama dan humaniora. Tulisan ini diorganisir menjadi empat bagian yakni pendahuluan, ilmu pemerintahan sebagai ilmu terapan, proses keilmuan dan posisi dan tantangan Riset dan Publikasi Ilmu Pemerintahan Indonesia di dunia.

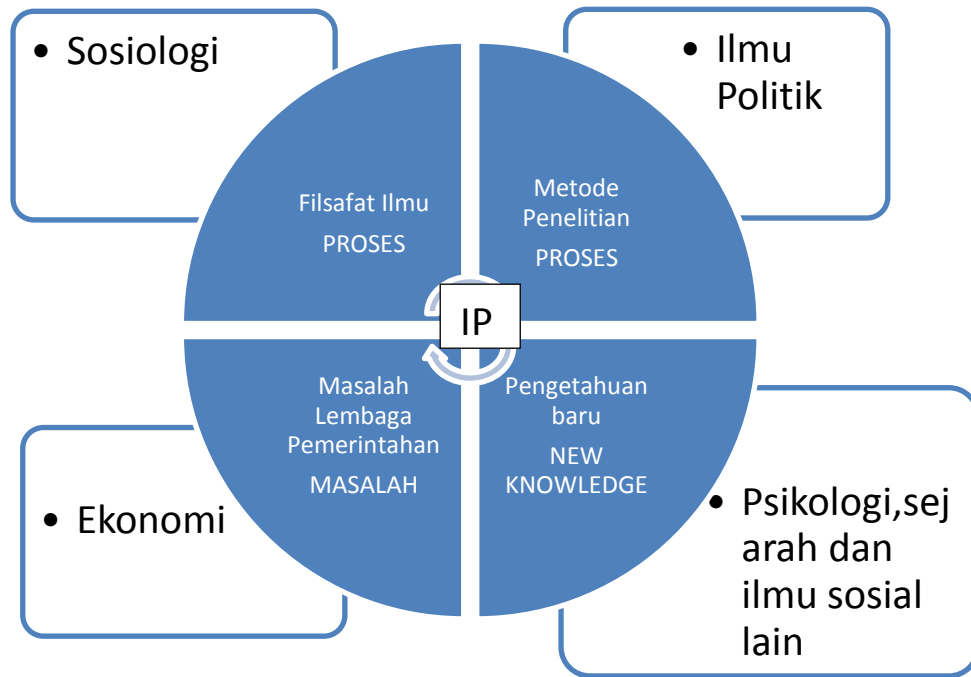
2. Ilmu Pemerintahan sebagai Ilmu Terapan Interdisiplin

Pada dasarnya ilmu pemerintahan atau kajian pemerintahan (*governance*) yang dikenal di berbagai negara sebagai ilmu terapan interdisiplin. Sebagai ilmu sosial terapan interdisiplin, ilmu pemerintahan menjelaskan tentang pemecahan masalah manusia dengan segala aspek hidupnya, tingkah laku perorangan atau bersama dengan pendekatan interdisiplin dengan kelembagan pemerintahan.

Metode deduktif dan induktif dikembangkan oleh ilmuwan sosial untuk menjawab masalah kemasyarakatan. Dengan mengikuti aliran Poperian, abstraksi dari pikiran manusia dapat membentuk teori-teori sosial baru berasal dari masalah-masalah yang dihadapi. Para ahli filsafat ilmu pengetahuan sudah sejak lama meneliti perkembangan ilmu-ilmu sosial, ilmu humaniora dan ilmu-ilmu agama berdasarkan pada intervensi baik dari aspek konten

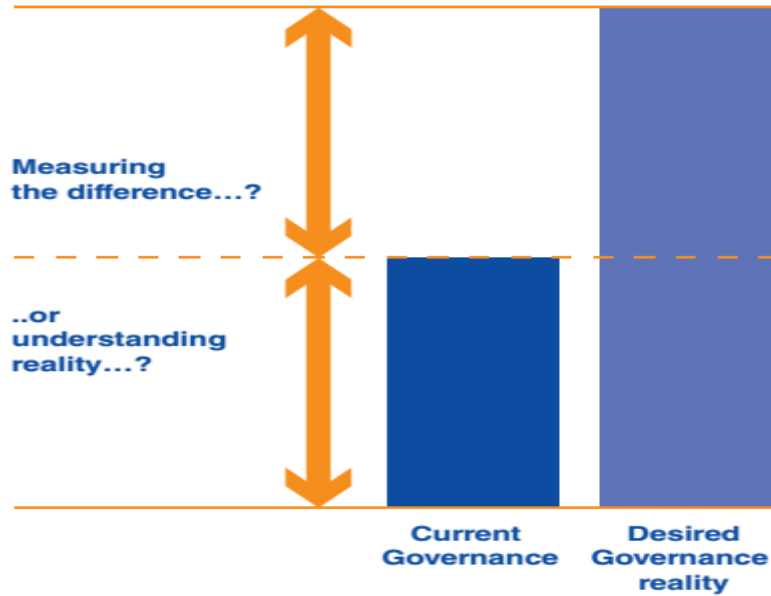
maupun konteks, dengan menggunakan metode induktif. Karl E Popper (2005) seorang filosof ilmu pengetahuan menyatakan bahwa teori-teori ilmu sosial bukan dikonfirmasi tetapi difalsifikasi. Menurut Popper ilmu dikembangkan dari **masalah** (M_1), dan selanjutnya dikembangkan menjadi teori (T_1) dengan deduksi untuk meramal ($R_{1...n}$). Ramalan ini diujikan dengan uji coba atau eksperimen. Pemikiran Popper ini lebih melihat perkembangan teori-teori dari sisi konten. Dalam sisi konteks, Thomas Kuhn (2012) melihat perkembangan teori ilmu sosial dari tahapan anomali, revolusi ke ilmu normal.

Pengembangan teori-teori sosial dengan menggunakan metode induktif dengan kasus-kasus tertentu nampaknya menjadi jawaban kekinian. Dengan berbagai versi para ilmuwan sosial mengusulkan epistemologi baru dengan berbagai istilah seperti integratif, intervensi dan penyelesaian masalah, sebagaimana digunakan oleh Popper diatas. Lowea dan kawan-kawan (2013) menamakan sebagai ilmu-ilmu intervensi, atau ilmu-ilmu sosial intervensi yang melakukan riset untuk memecahkan masalah kemanusiaan. Dalam istilah yang hampir mirip Amin Abdullah (2013) mengusulkan integrasi dan interkoneksi keilmuan Ilmu Kalam/Aqidah yang tidak dibarengi ilmu sosiologi dan antropologi menjadikan keimanan seseorang penuh dengan rasa tidak nyaman, jika hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda keyakinan dan agama dan sebaliknya, keahlian dalam bidang antropologi, sosiologi, kedokteran yang tidak memahami persoalan fikih dalam berhubungan sosial dengan wanita juga dapat mendatangkan madarat atau resiko yang tidak terduga (Abdullah, 2013).



Gb.1. Ilmu Pemerintahan sebagai Ilmu Intervensi Interdisiplin

Dengan mengikuti istilah yang digunakan oleh Lowea dan kawan-kawan menamakan ilmu pemerintahan sebagai **ilmu-ilmu intervensi, atau ilmu-ilmu sosial intervensi** yang melakukan riset untuk memecahkan masalah kemanusiaan. Proses ilmu pemerintahan atau kajian pemerintahan secara epistemologis berawal dari masalah yang dihadapi oleh umat manusia dengan menggunakan metode penelitian yang terbaru, guna menghasilkan pemahaman yang baru tentang masalah-masalah pemerintahan. Ilmu pemerintahan sebagai ilmu terapan seharusnya berkontribusi pada prognosis pemerintahan yang ideal dalam kondisi yang sedang berubah, dan bukan hanya menjawab dampak dari perubahan itu sendiri. Ilmu-ilmu sosial mempunyai peran penting didalam *social shaping of technology (SST)*, sebagai pilihan choices, walaupun unconscious, inherent dalam desain dan penerapan inovasi (Lowe, P., Phillipson, J., & Wilkinson, K. (2013). Perkembangan teknologi informasi memaksa pemerintah menerapkan regulatory convergence refers, dari regulasi yang terpisah satu sama lain menjadi *single legal and regulatory framework* (Garcia-Murillo and MacInness, 2002).



Gb.2. Kesenjangan Kondisi Governance Sekarang dan yang diharapkan

Source: European Commission, Analysing and Addressing Governance in Sector Operations, Luxemburg, 2009. In https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-tools-and-methods-series-governance-in-sector-operations-200811_en_2.pdf

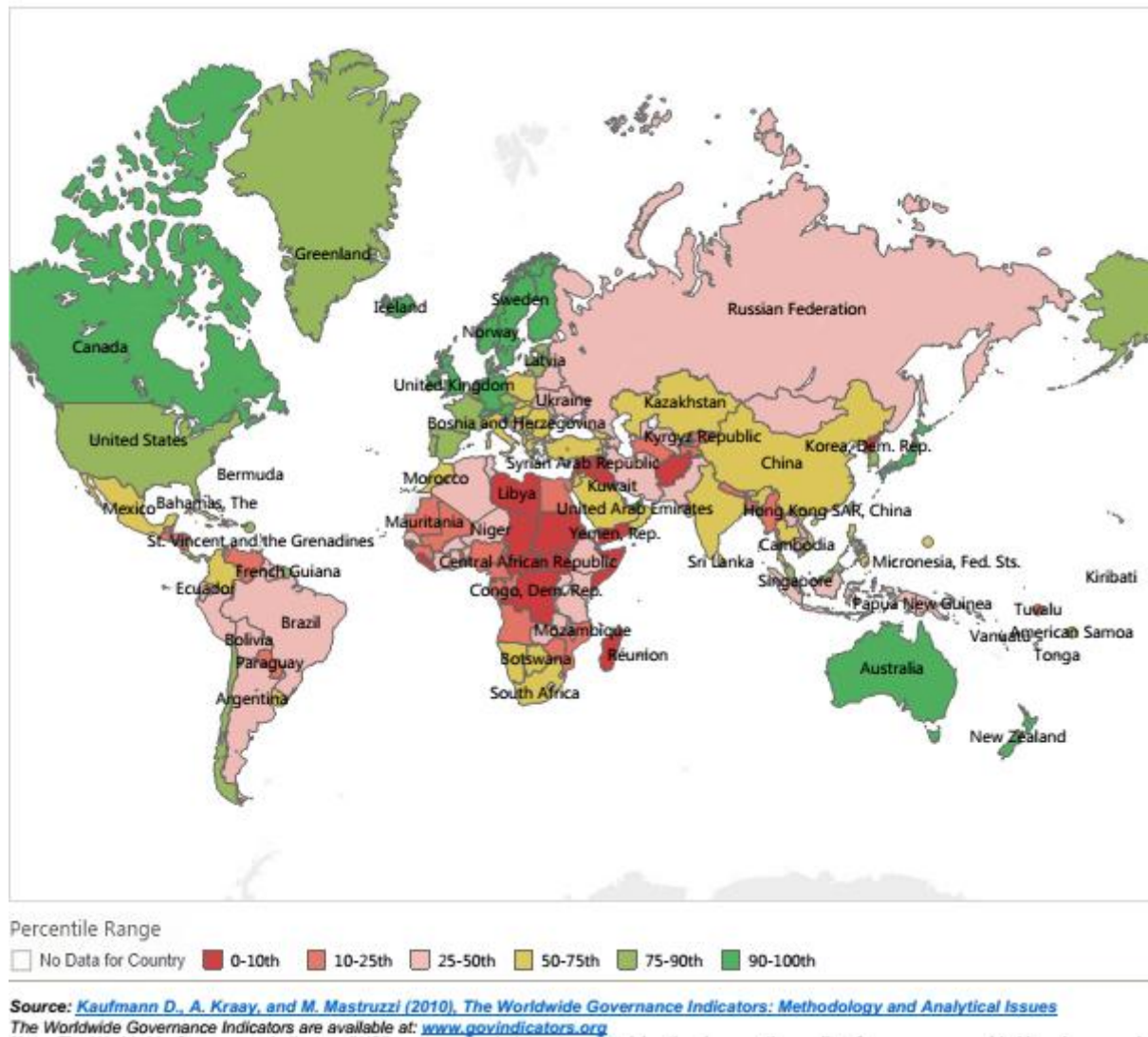
<i>Economic, Political, Cultural and Social Challenges</i>	<i>Governance Challeges</i>	<i>Information Communication Technology</i>	<i>Governance Experiments</i>	<i>Reimagined Governance</i>
Perubahan iklim, terorisme, ketimpangan sosial ekonomi, dan lain lain	Kelemahan institusi menemukan, menyelesaikan masalah secara cepat	Tantangan baru	privatisasi	Dari deliberasi ke kolaborasi
Intractable problems	Legitimasi	Semakin chaos	Digitalisasi	Dari sentralisasi ke desentralisasi
Wicked problems		Semakin cepat		Dari tertutup ke terbuka
Independent global problems		Semakin terbuka		

Sumber: Dimodifikasi dari <http://thegovlab.org/wp-content/uploads/2013/06/GovLabMapDocument.pdf>

Bank Dunia mulai memfokuskan penguatan kapasitas pemerintahan di dunia dengan memanfaatkan hasil–hasil penelitian oleh Kaufmann (dan kawan-kawan mulai tahun 2005. Salah satu ukuran global yang dikembangkan oleh Bank Dunia adalah Governance Index. Salah satu variabel indeks governance adalah efektivitas pemerintahan. *Government effectiveness captures perceptions of the quality of public services, the quality of the civil service and the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the government's commitment to such policies* (<http://governanceindex>). Worldwide Governance menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

- EIU Quality of bureaucracy / institutional effectiveness
- Excessive bureaucracy / red tape
- GCS Infrastructure
- Quality of primary education
- GWP Satisfaction with public transportation system
- Satisfaction with roads and highways
- Satisfaction with education system
- IPD Coverage area: public school
- Coverage area: basic health services
- Coverage area: drinking water and sanitation
- Coverage area: electricity grid
- Coverage area: transport infrastructure
- Coverage area: maintenance and waste disposal
- PRS Bureaucratic quality

2015, Government Effectiveness



Gb.4. Efektivitas Pemerintahan di Dunia (2015)

Dari indikator-indikator yang dikembangkan Bank Dunia dapat disimpulkan bahwa kajian ilmu pemerintahan atau kajian pemerintahan semakin relevan yang berasal dari Douglas North and Elinor Ostrom merupakan pemenang nobel ilmu ekonomi dengan hasil karya yang mendalam tentang kelembagaan pemerintahan di berbagai negara banyak memberikan kontribusi teoritis dan praktis.

3. Proses Keilmuan

Dari berbagai filosof ilmu pengetahuan dapat ditarik benang merah bahwa ilmu-ilmu sosial berkembang pada abad ke-21 harus mempunyai ciri pemecahan masalah kemanusiaan, atau mengintervensi masalah kemanusiaan dengan tujuan untuk melakukan

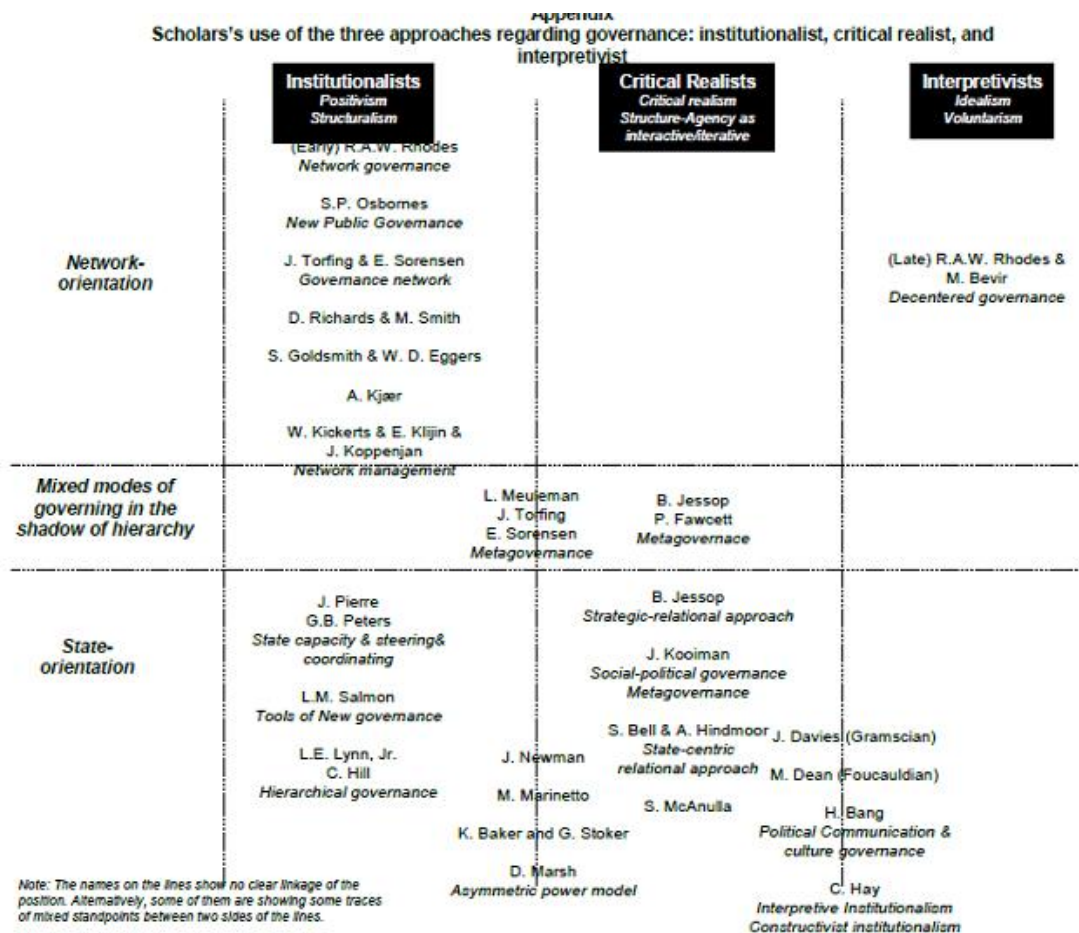
inovasi dengan menggunakan pendekatan integratif dan interkoneksi antara ilmu satu dengan yang lainnya atau lebih dari tiga bidang ilmu. Dalam hal ini peneliti dapat belajar dari studi lapangan untuk mengembangkan teori-teori baru dan memecahkan masalah kemanusiaan yang semakin kompleks dari transformasi masyarakat yang sedang soberlangsung. Oleh karena itu tema-tema riset ilmu sosial akan lebih banyak berbasiskan pada masalah dan menggunakan pendekatan interdisipliner antarbidang keilmuan termasuk ilmu-ilmu eksakta. Bagaimana kemampuan peramalan ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu pemerintahan? Sudah tentu kemampuan dan ketepatan peramalan akan sangat tergantung sejauhmana kemampuan ilmuwan untuk membaca pola-pola yang ada dengan riset tindakan (*action research*) dan memprediksi ke depan. Sebagai contoh teori kelembagaan (*institutionalism*) merupakan kajian ilmu ekonomi, ilmu politik dan sosiologi.

Tabel 1. Model Epistimologi

Metode Keilmuan (<i>mode of Science</i>)	Cara Penemuan dan Intervensi (<i>Site of discovery and intervention</i>)	Pengetahuan yang dihasilkan (<i>Knowledge generated</i>)	Asumsi Epistimologi	Contoh
Observasi	Lapangan	Observasi alamiah, ke arah induksi	Semua peneliti mengamati, tetapi terlibat dan pengamat netral	Ilmu-ilmu sosial klasik dan ilmu lingkungan klasik
Experimen	Laboratorium	Hasil dari ekeperimen terkontrol, kearah deduksi	Semua peneliti adalah eksperimen, yang menjamin kondisi-kondisi terkontrol dan dapat direplikasi	Ilmu-ilmu fisik dan biologi
Intervensi	Lapangan	Observasi dan eksperimen melalui intervensi dengan tujuan inovasi	Peneliti belajar dari intervensi lapangan	Riset tindakan (<i>action research</i>), ilmu rekayasa, ilmu sosial dan lingkungan terapan

Sumber: Lowea, Philip, et al. (2013). "Why social scientists should engage with natural scientists", *Contemporary Social Science*, 2013, Vol. 8, No. 3, 207 –222, <http://dx.doi.org/10.1080/21582041.2013.769617>.

Studi governance secara garis besar terbagi kedalam dua aliran besar yaitu studi jejaring dan studi pada orientasi negara (Ungsuchaval, T.U.,2016). Yang pertama memfokuskan pada governance sebagai jejaring antar aktor dan kedua memfokuskan penguatan negara didalam mengelola pemerintahan. Paper ini menganalisis evolusi teori governance dari tahun 1980an sampai sekarang, dengan kesimpulan bahwa studi governance dipengaruhi oleh lingkungan dimana studi dilakukan.



Gb. 3. Teori Governance

Source: UNGSUCHAVAL, T. U. (2016). Transcending the Institutional-Interpretivist Binary: Realizing Critical Realist Theory of Governance as Metagovernance. *Jurnal Studi Pemerintahan: Journal of Government and Politics*, 7(4).

Dalam studi desentralisasi sebagai contoh sebagai studi relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kajian ini menjadi fokus berbagai disiplin seperti administrasi publik, ilmu politik sosiologi, ekonomi. Pendekatan-pendekatan yang ada adalah public administration, social capital, local choice, decision space, new economic institutionalism

(Bossert, 1998; Haziz, V, 2014), new public management (Gruening, G., 2001). (new economy sociology (Nee, 2008), and ethnicity politics (Ribot, J. C., 2002, Duncan, C. R., 2007. Semakin penerapan desentralisasi beragam, semakin banyak pula implikasi teori yang baru Dengan mengacu kepada Popperian, teori baru berdasarkan pemecahan masalah yang ada (Popper, K. R., 1959), masalah desentralisasi muncul dari teori yang ada dan diuji di lapangan atau diverifikasi apakah dapat memecahkan masalah. Proses ilmiah selalu berupa

proses evolusi: $PS_1 \rightarrow TT_1 \rightarrow EE_1 \rightarrow PS_2$.

Dennis Rodinelly dan Shabbir Cheema (1983) mengenal konsep decentralization policy approach di dunia ketiga dalam World Bank Project, dengan pendekatan public administration (PA): delegation, devolution, deconcentration and privatization. Namun PA (PS1) tidak dapat menjawab mengapa pendekatan yang sama menghasilkan output yang berbeda. Kemudian, pada pertengahan tahun 1990an, ilmuwan sosial mengenal teori baru (PS1), dengan *conjectures, or tentative theories* (TT) (Popper, K.R., 1959), dengan tujuan untuk falsifikasi. Desentralisasi dipelajari dari social capital approach berdasarkan studi Robert Putnam di Italy. Teori ini mengeksplorasi mengapa beberapa pemerintah lokal gagal melaksanakan desentralisasi dan yang lain berhasil, yang dipengaruhi oleh *civic participation* dan *norm support* (Putnam, R. D., at al.,1994). Proses ini disebut error elimination (EE), yang mirip dengan fungsi ilmu seperti evolusi biologis (Popper, K.R., 1959). Teori selanjutnya menganalisis desentralisasi adalah local choice, decision space, new economic institutionalism (Bossert, 1998; Haziz, V, 2014). Pendekatan local choice dari ilmu ekonomi dengan utjuan melihat pilihan lokal dalam sumberdaya dan intergovernmental transfers dari pemerintah atasan (Musgrave and Musgrave, 1989 in Bossert, 1989).

New public management movement memepkenalkan principal agency approach yang memposisikan central government as a principal dan local authorities as an agents. Sementara itu decision space approach dikembangkan dalam kerangka public administration dan local choice approaches (Bossert, 1989). Teori baru yang diperkenalkan adalah new economic institutionalism untuk mempelajari complexity decentralization implementation in Southeast Asia countries, like Indonesia, Phillipines and Thailand (Hadiz, V.R. 2004).

4. Posisi dan Tantangan Riset dan Publikasi Ilmu Pemerintahan Indonesia di dunia

Dalam percaturan dunia, penelitian dan publikasi serta reputasi ilmu pemerintahan dan ilmu politik oleh universitas Indonesia tidak nampak. Dari 200 universitas di dunia, terdapat 28 universitas di Asia yang memiliki reputasi subjek ilmu politik dan studi internasional, dan tidak ada universitas dari Indonesia. Dengan kata lain, didunia akademik internasional Indonesia tidak masuk dalam radar keilmuan.

Tabel 1. top universities for politics & international studies, with the QS World University Rankings by Subject 2016 in ASIA

W Rank	University	Score	Acad Reu	Emp Rep	Cita	H-In
	Bilkent University		47.3	61.6	78.5	77.4
151-200	The Hebrew University of Jerusalem		53.4	41.8	83.9	75.6
13	National University of Singapore (NUS)	81.3	78.9	87.7	80	75.6
38	Tsinghua University	73.3	66.7	84	75.6	71.6
151-200	Koc University		41.2	61.5	75.1	69.3
51-100	Nanyang Technological University, Singapore (NTU)		53.2	85.6	74.4	69.3
51-100	Jawaharlal Nehru University		67.8	49.2	72.7	66.9
36	Fudan University	73.6	68.9	84.8	70.6	66.9
51-100	City University of Hong Kong		56.9	79.5	81.8	64.3
23	The University of Hong Kong	77.4	72.3	90.5	77.1	64.3
19	The University of Tokyo	78.7	76.2	89.9	72.4	64.3
51-100	Korea University		64.6	79.9	71.3	64.3
151-200	Middle East Technical University		45.2	63.2	66.4	64.3
51-100	The Chinese University of Hong Kong (CUHK)		59.7	85.3	73.9	61.3
29	Peking University	74.9	70.9	87.4	71.3	61.3
51-100	Yonsei University		65.2	79.2	75.6	58

39	Seoul National University	73.1	69.3	85.4	69.8	58
51-100	Keio University		70.9	72.7	67.3	58
101-150	Hitotsubashi University		51.5	70.7	62.8	58
51-100	National Taiwan University (NTU)		63.5	81.3	58.5	58
101-150	Kyung Hee University		43	80.5	65.6	54.3
101-150	Renmin (People's) University of China		58.1	66.4	65.1	54.3
51-100	National Chengchi University		57.5	71.7	62.1	54.3
51-100	Waseda University		70.4	79.1	58.7	50
101-150	Sungkyunkwan University (SKKU)		51.9	84.4	54.7	50
48	Kyoto University	71	73.5	80.4	51.6	50
101-150	Osaka University		54	69.2	48.1	50
151-200	Hanyang University		47.2	69	42.1	50

Sumber: <http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2016/politics>

Universitas-universitas dari negara Korea, Turki, India, Hongkong, China, Singapura dan Jepang menjadi mainstream penelitian dan publikasi ilmu politik dan studi internasional. Dalam ilmu sosial semakin banyak publikasi dan semakin tinggi sitasi atau H-index, semakin berpengaruh pada perkembangan ilmu itu sendiri atau bahkan pada aplikasi teori di dunia nyata. Universitas-universitas yang memiliki sejarah panjang dalam studi ilmu politik ternyata tidak memiliki tradisi penelitian dan publikasi yang kuat, atau malah sebaliknya. Kita hampir tidak memiliki referensi yang lengkap tentang studi pemerintahan di Indonesia yang ditulis oleh ilmuwan universitas.

Ketidakmampuan ilmuwan ilmu pemerintahan Indonesia dalam riset dan publikasi memiliki implikasi pada penyelesaian masalah pemerintahan di Indonesia. Sejak tahun 1998, Pemerintah Indonesia dengan mantap menerapkan berbagai regulasi yang mengacu kepada New Public Management dari hasil riset di negara lain tanpa melihat latar belakang budaya politik Indonesia. Salah satu penerapan dari filosofi NPM adalah dibentukkannya Badan Layanan Umum. Namun BLU telah dikelola dengan tidak profesional, karena struktur yang tidak jelas dan untuk meningkatkan gaji pegawainya (Choi, JW, 2016). Demikian pula

penerapan pemilihan langsung kepala daerah ternyata di beberapa daerah memperkuat politik patro klien dan dinasti.

Sebaliknya kajian-kajian politik dan pemerintahan Indonesia didominasi oleh ilmuwan asing sejak tahun 1950an telah menjadi aliran tersendiri seperti Cornell University, Belanda, ANU dan NUS pada saat ini. Hasil studi mereka menjadi rujukan dan mempengaruhi *policy maker* di dalam mendesain kebijakan. Dari urian diatas maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi praktis pada forum ini bahwa:

- a. Asosiasi perlu membuat peta jalan penelitian ilmu pemerintahan atau kajian pemerintahan di Indonesia dengan menghilangkan egoisme universitas masing masing;
- b. Asosiasi perlu melaksanakan ***joint collaboration research*** dalam skala nasional untuk menambah pengetahuan baru dalam topik tertentu sesuai dengan peta jalan yang telah dibuat;
- c. Asosiasi memfasilitasi penerbitan buku ajar dan referensi sesuai dengan kebutuhan Indonesia dari hasil riset butir b diatas dan berkontribusi pada pengembangan ilmu di tingkat global;
- d. Asosiasi perlu memperkuat jurnal ilmiah yang ada dan penambahan jurnal ilmiah baru untuk mempublikasi hasil riset terbaru.
- e. Asosiasi perlu memperkuat kelembagaan dengan kesadaran bahwa tanpa asosiasi yang kuat masa depan ilmu ini akan lenyap.

***) Direktur JK School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**

Referensi

Abdullah, M Amin (2013). "AGAMA, ILMU DAN BUDAYA, Paradigma integrasi-interkoneksi keilmuan", pidato di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Yogyakarta, 17 Agustus.

Kuhn, T. S. (2012). *The structure of scientific revolutions*. University of Chicago Press.

Nurmandi, A. (2003). "Kritik Terhadap Metode Siklus Empiris Dalam Ilmu Administrasi Publik: Tinjauan Terhadap Perkembangan Ilmu Administrasi Publik". *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 7(1)

CHOI, J. W. (2016). New Public Management or Mismanagement? The Case of Public Service Agency of Indonesia. *Journal of Government and Politics*, 7(1).

Popper, K. (2005). *The logic of scientific discovery*. Routledge

Duncan, C. R. (2007). Mixed outcomes: The impact of regional autonomy and decentralization on indigenous ethnic minorities in Indonesia. *Development and Change*, 38(4), 711-733.

Gruening, G. (2001). Origin and theoretical basis of New Public Management. *International public management journal*, 4(1), 1-25.

Popper, K. R., & Inc. Marquis Who's Who. (1959). Karl Popper. na.

Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1994). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton university press.

Ribot, J. C. (2002). *African decentralization: local actors, powers and accountability*. Geneva: UNRISD.

Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives. *Development and Change*, 35(4), 697-718.

Sovacool, B. K. (2014). What are we doing here? Analyzing fifteen years of energy scholarship and proposing a social science research agenda. *Energy Research & Social Science*, 1, 1-29.